

## Presiden Jokowi Resmi Teken UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS resmi diundangkan usai ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 9 Mei 2022. UU tersebut berisi 93 pasal.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU TPKS dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (12/4) lalu.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Proses pengesahan tersebut dimulai dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy

Aditya yang juga sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS antara DPR, pemerintah dan koalisi masyarakat peduli perempuan.

Setelah Willy Aditya selesai membacakan sambutanannya, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menanyakan ke seluruh anggota DPR RI apakah setuju dengan pengesahan RUU TPKS menjadi UU. "Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta sidang.

"Setuju," jawab para peserta.

Sontak sejumlah elemen kelompok koalisi peduli perempuan yang duduk di balkon ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta bersorak dan bertepuk tangan. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## Hari Ini Dirjen Otda Akmal Malik Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat

Rencananya hari ini, Kamis (12/5), Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dilantik sebagai Pj Gubernur Sulbar, dan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan melantik lima orang penjabat (pj) gubernur untuk lima provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya telah habis pada Kamis (12/5).

Salah satu yang akan dilantik yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menggantikan

Gubernur Muhammad Ali Baal Masdar yang segera habis masa jabatannya.

Penunjukan Akmal jadi penjabat gubernur dibenarkan juga oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Lukman Said, Rabu (11/5). Dia juga telah menerima undangan pelantikan Penjabat Gubernur Sulbar

yang ditandatangani Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro pada 10 Mei 2022. Pelantikan akan dilangsungkan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Selain Akmal, dua nama lain yang dipastikan dilantik esok hari yakni Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Sekda Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten.

Berdasarkan informasi, ada lima gubernur yang masa jabatannya akan habis pada

pertengahan Mei ini. Mereka adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, dua nama untuk posisi Pj Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung belum terkonfirmasi. Sebelumnya, kabar mengenai pelantikan lima orang pj gubernur oleh Mendagri ini disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Sebagaimana diketahui, pelantikan pj gubernur sedianya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, saat ini kepala negara sedang dalam kunjungan ke

Washington DC, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat.

"Yang melantik Mendagri," ujar Heru.

Agenda pelantikan tersebut juga dibenarkan oleh Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga. Menurutnya, lima orang pj gubernur akan dilantik pada Kamis oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Iya benar (lima pj gubernur). Rencana besok Kamis (dilantik Mendagri)," katanya.

Adapun selain lima gubernur yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei ini, ada dua gubernur lain yang juga akan menyelesaikan masa jabatannya pada tahun ini adalah Gubernur Aceh Nova Iriansyah (5 Juli 2022) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (16 Oktober 2022). ● han



FOTO: ANT

### ZIARAH DI MAKAM PAHLAWAN

Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) menabur bunga saat berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sepuluh Nopember, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/5). Ziarah ke makam pahlawan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut (Hardikal) ke-76.

## KY Kirim 11 Nama Calon Hakim ke DPR

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku, belum mengetahui apakah surat dari Komisi Yudisial (KY) terkait 11 nama calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) sudah diterima DPR. Ia akan mengecek untuk memeriksa keberadaan surat tersebut.

"Tentang soal surat dari Komisi Yudisial, ini karena masih reses, saya baru hari ini mau cek apakah sudah masuk atau belum," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/5).

Jika memang surat tersebut telah diterima, imbuh dia, maka selanjutnya pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dengan meneruskan surat tersebut kepada Komisi III, yang menjadi mitra KY.

Setelah itu, lanjut politikus Gerindra itu, Komisi III akan mengecek apakah nama-nama yang diajukan dapat mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Akan dilihat oleh komisi terkait apakah memang calon-calon tersebut memang layak dilakukan fit and proper test atau tidak," jelasnya.

KY mengirimkan delapan nama calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc Tipikor untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali ke pimpinan DPR. Dari 11 nama itu, empat calon merupakan calon hakim agung kamar pidana. Kemudian satu calon hakim agung untuk kamar perdata dan satu calon untuk kamar agama. Dua calon lainnya untuk kamar tata usaha negara.

Tiga orang dinyatakan lulus seleksi oleh Komisi Yudisial (KY) untuk posisi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini diumumkan Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata melalui pengumuman Nomor 06/PIM/RH.04.06/05/2022 yang ia tandatangani.

Ketiga calon hakim Ad Hoc Tipikor tersebut adalah, Purnomo Hadi (Hakim Ad Hoc Tipikor PT Makassar), Arizon Mega Jaya (mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang), dan Rodjai S Irawan (Hakim Ad Hoc Tipikor pada PT Mataram).

"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan karenanya tidak dapat diganggu gugat," tulis Mukti Fajar dalam pengumuman tersebut, Selasa (10/5).

Mukti Fajar menyampaikan, nama-nama itu sudah diputuskan dalam rapat pleno KY pada 28 April 2022. Mereka telah melalui proses seleksi selama 6 bulan, mulai dari seleksi administrasi, kualitas, integritas, kesehatan, dan terakhir tes wawancara pada akhir April lalu.

Nama-nama ini akan diajukan ke pimpinan DPR RI. Selanjutnya, Dewan melalui Komisi III akan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya atas nama-nama calon tersebut.

Sebelumnya, KY juga menetapkan 8 calon hakim agung. Empat merupakan calon untuk kamar pidana, 1 calon untuk kamar perdata, 1 calon untuk kamar agama, dan 2 calon untuk kamar tata usaha negara. ● mei

## Eks Petinggi PT Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidangkan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas perkara Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Tbk tahun 2008-2012, Adi Wibowo, kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Selasa (10/5).

Adi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011.

"Tim Jaksa telah selesai menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II untuk tersangka AW (Adi Wibowo) dari tim penyidik karena telah terpenuhinya seluruh kelengkapan isi berkas perkara," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Dengan demikian, penanganan Adi Wibowo beralih menjadi tanggung jawab tim jaksa KPK. Eks Pejabat Waskita Karya itu tetap ditahan selama 20 hari kedepan terhitung 10 sampai dengan 29 Mei 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ali mengatakan, berkas perkara dan surat dakwaan akan segera dilimpahkan oleh tim jaksa KPK ke Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam waktu 14 hari kerja.

"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Pusat," ucapnya.

Sebagai informasi, pembangunan kampus IPDN merupakan proyek pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Kepala Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2011, Dono Purwoko, dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (AKPA), Dudy Jocom, sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, Kemendagri merencanakan empat paket pekerjaan pembangunan Gedung Kampus IPDN pada tahun anggaran 2011. Salah satu pekerjaan itu adalah pembangunan gedung kampus IPDN Gowa, Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak Rp 125 miliar.

Agar bisa mendapatkan proyek tersebut, Adi Wibowo diduga melakukan penganturan bagi calon pemenang lelang. Penganturan itu di antaranya dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek

PT Waskita Karya.

Adi Wibowo juga diduga menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan nantinya mempermudah PT Waskita Karya dimenangkan.

"Agar pembayaran bisa dilakukan 100 persen, tersangka AW kembali diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100 persen, di mana fakta di lapangan hanya mencapai progres 70 persen serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/5).

Adi Wibowo juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pihak-pihak lain di Kemendagri.

"Akitab perbuatan tersangka AW dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar," kata Ghufron.

Atas perbuatannya, Adi Wibowo disanggakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● han

## Terima Suap, 15 Anggota DPRD Muara Enim Diperiksa Jadi Tersangka

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 15 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Muara Enim, sebagai tersangka kasus menerima suap dari pengusaha Robi Okta Fahlevi, Rabu (11/5).

Berdasarkan pantauan di lokasi, satu persatu tersangka ke luar dari area Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berjalan dengan tangan terborgol sembari memperlihatkan wajah tertekuk.

Diketahui sebelumnya, KPK kembali menetapkan 15 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka penerima suap. Sebanyak 15 legislator Muara Enim tersebut terdiri 10 anggota DPRD periode 2014-2019, dan lima anggota DPRD periode 2019-2023.

Adapun, 10 anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 terdiri dari, Daraini (DR); Eksa Hariawan (EH); Elison (ES); Faizal An-

war (FA); Hendly (HD); Irul (IR); Misran (MR); Tjik Melan (TM); Umam Pajri (UP); serta William Husin (WH).

Sedangkan lima anggota DPRD periode 2019-2023 yakni, Agus Firmansyah (AFS); Ahmad Fauzi (AF); Mardalena (MD); Samudera Kelana (SK); serta Verra Erika (VE). Mereka diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp3,3 miliar dari pengusaha Robi Okta Fahlevi.

Uang sejumlah Rp3,3 miliar tersebut diduga sebagai 'uang aspirasi atau uang ketok palu' yang diberikan oleh Robi Okta Fahlevi. Robi menyuap para anggota DPRD Muara Enim agar proyek-proyek yang akan dikerjakannya tidak diganggu atau jalan terus.

Terdakwa Robi, kata Roy, dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● han

## Jenderal Pur Widjojo Soejono Dimakamkan di TMP Kalibata

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Darat (AD) berduka atas berpulangnya salah satu Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono, Rabu (11/5). Mantan Danjen Kopassus itu meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto pada pukul 04.43 WIB di usia 94 tahun.

KSAD Jenderal TNI Dandung Abdurachman menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam. Dudung menilai Widjojo merupakan Putra terbaik TNI AD.

"Dharma bakti almarhum kepada bangsa dan negara semasa hidup bisa kita jadikan tauladan dan kita doakan semoga Almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT, diampuni segala kekhilafannya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Dudung, Rabu (11/5).

Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Jenderal Dandung bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup) pada acara pemakaman tersebut.

Widjojo Soejono lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 9

Mei 1928. Dia menjabat sebagai Komandan Kopasus ke-6 dari tahun 1967 hingga 1970.

Karier militernya cukup cemerlang, pernah menjabat Panglima Kodam VIII/Brawijaya (1971-1975), Panglima Kowilhan III (Sulawesi-alimantan) (1975-1978), kemudian Panglima Kowilhan II (Jawa, Nusra dan Timor Timur) (1978-1980), Kendali operasional terhadap Operasi militer di Timor Timur dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kopkamtib (1980-1982) dengan pangkat Jenderal TNI. ● mei



FOTO: ANT

### KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA PRAJURIT TNI

Panglima Divisi Infanteri 2/Kosrad Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto (tengah) memberikan ucapan selamat kepada prajurit Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha pada upacara pelantikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Operasi Militer Selain Perang (KPLB-OMSP) dan Penyerahan Piagam Penghargaan Satgas Pamtas Penyangga di Madiun, Jawa Timur, Rabu (11/5). Sebanyak tujuh orang prajurit Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi karena dinilai berhasil melumpuhkan tiga anggota Kelompok Separatis Teroris Papua dan mendapatkan satu pucuk senjata Mouser saat kontak tembak Kabupaten Puncak Papua.

**PT DOMAS AGROINTI PRIMA**  
Berkedudukan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Domas Agrointi Prima tertanggal **11 Mei 2022**, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan konversi hak tagih Poseidon Corporate Services Ltd ("Poseidon") terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang (*Debt Settlement Agreement*) antara Perseroan dan Poseidon tertanggal 25 Maret 2022. Konversi hak tagih tersebut akan menjadi penambahan penyertaan modal melalui kompensasi hak tagih sebagai kewajiban penyetoran atas harga saham, dengan nilai keseluruhan sebesar USD 230.490.843,72 dengan menggunakan kurs Rp14.400 sehingga setara dengan Rp3.319.068.149.568 menjadi 9.483.040 saham seri B dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp350.000 per saham dan seluruhnya sebesar Rp3.319.064.000.000 menjadi setoran saham dalam Perseroan.
- Bahwa konversi hak tagih menjadi saham tersebut dilakukan dengan maksud untuk peningkatan modal Perseroan.

Pemberitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Kuala Tanjung, 12 Mei 2022  
Direksi  
PT Domas Agrointi Prima

**PENGUMUMAN**  
PENGALIHAN SEBAGIAN BESAR SAHAM  
PT INTI BOGA PERKASA ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini kami mengumumkan rencana Pengalihan sebagian besar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Bagi pihak ketiga yang berkepentingan dan merasa keberatan dengan rencana tersebut dapat mengajukan sanggahan atau keberatan kepada Perseroan.

PT INTI BOGA PERKASA  
Direksi